

Judul : MKD pastikan Novanto bakal mundur
Tanggal : Selasa, 05 Desember 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

MKD Pastikan Novanto Bakal Mundur

KPK Siap Hadapi Sidang Praperadilan

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memastikan Setya Novanto segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR.

Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) sudah menyadari posisinya sehingga tinggal menunggu waktu dan momentum tepat untuk bersikap.

"Beliau akan mengambil satu sikap dalam waktu dekat. Persoalan waktu dan kapannya, kami belum tahu," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sudding menceritakan, saat disambangi di Rumah Tahanan KPK pada Kamis (30/11), Novanto menyadari bahwa tugas-tugasnya sebagai ketua DPR akan terganggu. Meskipun pimpinan DPR bersifat kolektif-kolegial, Novanto menyadari betul bahwa dengan ketiadaannya tugas-tugas pimpinan DPR tidak berjalan secara optimal.

Karena itu, pergantian pada posisi ketua DPR merupakan hal penting agar kerja-kerja pimpinan DPR kembali normal. "Saya kira beliau sungguh sangat elegan ketika mengambil posisi untuk mundur," ucap dia.

Terkait materi pemeriksaan terhadap Novanto, Sudding menjelaskan, MKD akan mengonfirmasi apa yang disampaikan Novanto kepada pihak Kesenjangan DPR perihal posisinya yang mengaku masih di Ge-

dung DPR saat dilakukan penjemputan oleh KPK di kediamannya. Termasuk juga diminta keterangan perihal sebelum kecelakaan yang menimpa Novanto karena berdasarkan pengakuannya berangkat dari Gedung DPR. Setelah itu MKD akan langsung mengambil kesimpulan.

Seperti diketahui, Kamis (30/11), MKD mengirimkan tim ke Rutan KPK untuk memeriksa Setya Novanto. Mereka yang dikirim adalah Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura, serta dua anggota MKD yakni Maman Imanulhaq dari Fraksi PKB dan Agung Widyanoro dari Fraksi Partai Golkar.

Mereka melakukan pemeriksaan terhadap Novanto atas dugaan pelanggaran etika setelah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, berdasarkan aturan undang-undang, ketua DPR bisa diganti kalau yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diganti oleh fraksinya. Karena itu, pergantian dalam posisi Novanto bisa dilakukan ketika opsi kedua dan ketiga terpenuhi. "Jadi, kalau posisinya ti-

dak mundur, maka adanya pergantian itu jika dilakukan opsi ketiga. Dan itu merupakan wewenang internal Partai Golkar," tandas dia.

Karena itu, Fadli mengaku tidak terlalu mau ikut campur terkait posisi Novanto. Terlebih, sejauh ini tugas pimpinan DPR masih dapat berjalan dengan baik meski belum ada penggantian posisi ketua DPR. Tugas-tugas itu dijalankan secara kolektif-kolegial berdasarkan bidangnya masing-masing, yakni dirinya sebagai wakil ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan, Agus Hermanto sebagai wakil ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan, Fahri Hamzah selaku wakil ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Taufik Kurniawan selaku wakil ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan. "Jadi, kalau dari sisi pekerjaan, sejauh ini tidak masalah," ungkap dia.

Sementara itu, KPK menyatakan siap menghadiri sidang gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang praperadilan ini akan digelar pada Kamis (7/11). "Ya akan datang karena memang itu penundaan dari yang sebelumnya. Jadi, KPK yang diwakili Biro Hukum akan hadir," ungkap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

KPK, lanjut dia, juga sudah menyiapkan jawaban atas permohonan Novanto. KPK sudah memulai penyelidikan ulang untuk menetapkan kem-

bali Novanto sebagai tersangka. Ini juga untuk memenuhi aspek formalitas penetapan tersangka yang sebelumnya dipermasalahkan hakim Cepi Iskandar dalam praperadilan pertama yang dimenangkan Novanto. "Ini kan proses yang dimulai sejak awal lagi untuk tersangka SN. Jadi mulai dari penyelidikan, penyidikan, termasuk di dalamnya adalah penetapan tersangka," ungkap Priharsa.

Peluang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mendatang sangat terbuka lebar. Meski saat ini ada beberapa nama yang dianggap punya potensi menjabat ketua umum menggantikan Setya Novanto, dari sisi kebutuhan organisasi, sosok Airlangga dianggap paling tepat menjadi ketua umum.

Demikian disampaikan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I Nusron Wahid dan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin.

Menurut Nusron, meskipun saat ini belum ditentukan kapan jadwal diselenggarakan munaslub, dari suasana kebatinan para tokoh Golkar dan para ketua DPD I sudah mulai mengarahkan dukungannya kepada Airlangga. Untuk tetap menjaga suasana yang solid, bahkan ada keinginan agar terpilihnya ketua umum yang baru nanti diputuskan secara aklamasi.

● **rahmat sahid /
mula akmal**